

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor public merupakan sebuah entitas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Entitas ini menjalankan kegiatannya dengan sumber legitimasi yang berasal dari kepercayaan masyarakat sehingga dalam penyelenggaraannya harus dibarengi dengan pemerintahan yang bersih dan transparan (Putra, 2018 dalam Budiarto & Puspitasari, 2020).

Dalam kurun waktu yang tidak lama, akuntansi sector public mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mendapat perhatian lebih jika dibandingkan dengan sebelumnya (Batubara & Risna, 2020). Ningsih (2017) mengatakan fenomena yang dapat diamati sekarang terkait APBD yakni menguatnya tuntutan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas oleh organisasi sector public seperti unit kerja pemerintah dari pusat hingga daerah. Istilah “akuntabilitas public, reformasi sector public, *value for money*, *good public governance*, dan privatisasi” telah menambah kosakata baru dalam sector public seiring dengan munculnya isu-isu yang berakar pada tuntutan terciptanya *good public and corporate governance*. Dengan begitu, organisasi sector public dituntut untuk mengelola anggarannya secara transparan dan akuntabel.

Implementasi dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan agar pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi di organisasi sector public terlaksana dengan baik dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengungkapan informasi dan kegiatan pemerintah (Saraswati & Suhartini, 2022).

Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang sedang diusahakan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah guna mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada, tak terkecuali di bidang ekonomi. Dalam upaya perwujudan *good governance*, perubahan-perubahan pada sector public terus digencarkan sejalan dengan penerapan otonomi daerah dan tentunya berdampak pada daerah-daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang telah diterima dan dikelola (Shara, dkk., 2020). Akuntabilitas dan transparansi termasuk dua dari sembilan prinsip *Good Governance*. Dengan adanya implementasi yang memadai dari keduanya dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan mewujudkan harapan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut dapat terwujud melalui penganggaran berbasis kinerja agar hasilnya memuaskan.

Anggaran merupakan suatu pernyataan tentang estimasi kinerja yang ingin dicapai dalam periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009 dalam Merawati, 2019). Berbeda dengan anggaran, Merawati (2019) mengartikan penganggaran sebagai proses dalam menyiapkan suatu anggaran yang meliputi penentuan alokasi dana untuk

setiap program yang dimulai setelah perumusan dan perencanaan strategic. Lebih lanjut, Firmansyah (2019) mengemukakan bahwasanya penganggaran keuangan daerah harus terarah supaya keseluruhan dari proses penyusunan APBD dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, penetapan alokasi, skala prioritas, serta distribusi sumber daya yang mengikutsertakan masyarakat.

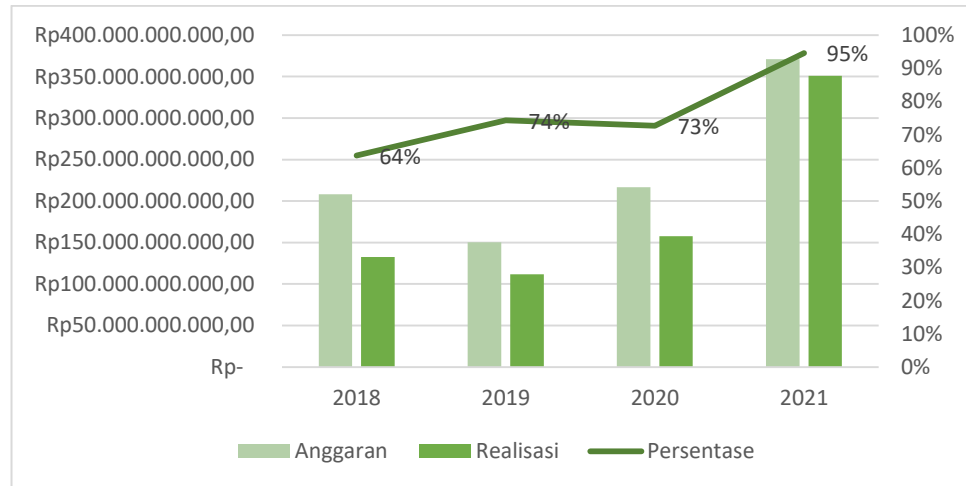
Menurut Muis, dkk., (2020) implementasi anggaran berbasis kinerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyempurnaan manajemen keuangan, dalam hal ini anggaran Negara yang tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan public serta efektivitas dari pelaksanaan program dan kebijakannya. Sistem penganggaran ini menurut Purnomo & Putri (2018) menekankan pada pendekatan *value for money* yang didasarkan pada tiga elemen yakni ekonomis, efisisensi, dan efektivitas.

Pelaksanaan anggaran dapat terlaksana secara efektif apabila penyusunan dan penerapannya memperhatikan dimensi-dimensi *budgetary goal characteristics* (Kenis, 1979 dalam Andriani, 2018). Penerapan *budgetary goal characteristics* yang terstruktur akan membantu mengidentifikasi lebih detail mengenai siapa saja yang terlibat dalam anggaran, tujuan anggaran, kesulitan yang dihadapi, *feedbacks* yang diterima, dan peningkatan kinerja melalui proses evaluasi sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam pengelolaan kinerja anggaran (Merawati, 2019). Dengan begitu, implementasi BGC diharapkan bisa mencapai tujuan anggaran yang telah ditetapkan karena dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai fungsi dan tujuannya.

Setiap organisasi memiliki tujuan untuk mencapai kinerja yang optimal dan tidak bisa terlepas dari kepuasan kerja aparatur pemerintah daerah dan komitmen organisasi sebagai bentuk profesionalisme *staff* pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Mauliza & Astuti, 2022). Komitmen organisasi dapat menjadi salah satu factor yang bisa mempengaruhi kejelasan tujuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Komitmen organisasi dapat meningkatkan kejelasan tujuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi sehingga pengelolaan kinerja anggaran dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menggunakan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. System penganggaran dengan pola tradisional sudah tidak relevan untuk digunakan karena perkembangan zaman yang dinamis sehingga dibutuhkan system anggaran yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini dengan basis *budget performance* yang memperhatikan aspek efisiensi dalam pelaksanaan anggaran (Periansya, dkk., 2021).

Gambar 1. 1
Realisasi Anggaran Belanja BPKPD Kab. Pamekasan



Sumber: LRA BPKPD Kab. Pamekasan, Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan selama periode 2018-2021, dapat diketahui bahwasanya penyerapan anggaran belanja mengalami fluktuasi. Rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan adanya program atau kegiatan yang belum optimal baik dalam proses perencanaan, implementasi, maupun pelaporannya. Hal tersebut perlu mendapat perhatian dari BPKPD Kabupaten Pamekasan agar implementasi anggaran berbasis kinerja dengan konsep *value for money* dapat dilaksanakan secara maksimal.

Tidak hanya itu, Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 2018-2021 juga menunjukkan bahwa persentase antara realisasi dengan pendapatan yang dianggarkan mengalami penurunan selama empat tahun terakhir. Hal tersebut terjadi karena adanya pandemic covid-19 sehingga beberapa program tidak

terlaksana disebabkan adanya pembatasan kegiatan. Permasalahan lain yang sedang dihadapi oleh BPKPD Kabupaten Pamekasan yakni anggaran belanja berupa program kegiatan yang diajukan melebihi proyeksi pendapatan sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran.

Mengingat begitu kompleksnya pengelolaan keuangan daerah dengan sumber daya manusia yang minim jika diukur dari aspek kualitas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap variable-variabel yang menjadi tolok ukur pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan berjudul **“Pengaruh *Budgetary Goal Characteristics*, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Pengelolaan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *budgetary goal characteristics* berpengaruh terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*?

4. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh *budgetary goal characteristics* terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*?
6. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *budgetary goal characteristics* terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh *budgetary goal characteristics* terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money*

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memiliki manfaat sebagai sumbangan pemikiran khususnya mengenai pengaruh *budgetary goal characteristics*, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money* dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Sebagai pembelajaran dan untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengamati suatu permasalahan, menambah ilmu dan wawasan penulis khususnya mengenai pengaruh *budgetary goal characteristics*, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep *value for money* dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

- b) Bagi Kantor BPKPD Pamekasan

Sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dan merumuskan program-program pendukung sehingga mampu meningkatkan kinerja anggaran dengan konsep *value for money*.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran dengan konsep *value for money*.